

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan Negara dipergunakan untuk pembiayaan dan pembangunan di Indonesia. Pajak menyumbang kontribusi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 70-80%. Prosentase anggaran yang besar harusnya mampu memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia. Pada tahun 2018 pemerintah menargetkan capaian penerimaan pajak sebesar Rp 1.424 Triliun. Yang sampai akhir november mampu terealisasi sebesar 1.136 Triliun atau sekitar 80% dari target yang ditetapkan (Kemenkeu, 2018)¹. Pada kurun waktu Periode 2014-2017, realisasi penerimaan pajak selalu di bawah target yang sudah ditetapkan pemerintah. Kontribusi tax amnesty yang diberlakukan pemerintah yang hanya 6 bulan terhadap realisasi penerimaan pajak di 2017, belum juga bisa meningkatkan penerimaan hingga mencapai target yang ditetapkan (Kemenkeu, 2018)¹

Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat dilihat dari sikap Wajib Pajak yang mendaftarkan diri, menghitung pajaknya, menyetor maupun melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) juga kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Kemenkeu, 2016)². Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindari pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas Negara (DJP, 2007)³.

Salah satu hal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sistem administrasi perpajakan yang sudah dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) (DJP, 2007)³. Direktorat Jendral Pajak (DJP) berupaya melakukan reformasi kebijakan perpajakan yang sesuai untuk menciptakan perpajakan yang adil,

1. www.pajak.go.id/sites/.../UU-KUP-001-13-UU%20KUP%202013-00%20Mobile

2. http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Annual_Report%202007

3. <http://www.pajak.go.id/electronic-billing>

kompetitif, dan memberikan kepastian hukum. Reformasi yang dilakukan yaitu di bidang kebijakan dan bidang administrasi (DJP, 2007)³. Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP), arah dan tujuan perubahan UU KUP mengaju pada kebijakan pokok sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan Negara
- Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah
- Menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi
- Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban
- Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan
- Meningkatkan penerimaan prinsip *Self assessment* secara akuntabel dan konsisten
- Mendukung iklim usaha kearah yang lebih kondusif.

(Pajak, 2013)¹

Menciptakan sistem administrasi perpajakan yang optimal DJP membuat program perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang disebut modernisasi perpajakan atau yang sekarang biasa disebut *e-Billing*. Program modernisasi ini dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan perkembangan sistem informasi teknologi terkini (DJP, 2007)². Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan modernisasi sistem administrasi

1. www.pajak.go.id/sites/.../UU-KUP-001-13-UU%20KUP%202013-00%20Mobile

2. http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Annual_Report%202007

3. <http://www.pajak.go.id/electronic-billing>

perpajakan memiliki ciri khusus, yaitu struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *Account Representative* (AR) dan *complaint center* untuk menampung keberatan wajib pajak (Rahayu dan Lingga, 2009).

E-Billing merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing yang pembayaran pajak ini resmi diterapkan pada 1 Januari 2016 di seluruh kanal pembayaran pajak, baik melalui ATM atau bank persepsi, wajib menggunakan mekanisme *e-Billing* (Pajak, 2016)³. Billing system merupakan sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik. Sistem *e-billing* akan membimbing pengguna mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi yang ingin dituntaskan (KEP-72/PJ/2016). Sementara, kode *Billing* adalah deretan kode unik yang diperoleh dari *e-Billing* dan digunakan sebagai kode pembayaran pajak (KEP-72/PJ/2016).

Dari beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh penerapan sistem *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak badan, rata-rata dalam hasil penelitian nya berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang dimana pengukuran dilakukan dengan cara yang sama yaitu kuisioner yang rata-rata hasilnya responden yang diberikan yaitu cukup baik sehingga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal perpajakan nantinya. Walaupun nilai dari uji pengaruh *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak badan berbeda-beda namun kesimpulan dari uji yang dilakukan keseluruhan adalah berpengaruh positif dan signifikan.

Salah satu daerah yang juga sudah menerapkan sistem *e-Billing* dalam melakukan pembayaran pajak yaitu Kabupaten Trenggalek. Sehingga berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji adakah pengaruhnya penerapan system *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan kenyataan bahwa Penerapan *e-Billing* mampu mempengaruhi 22,8% perubahan pada Kepatuhan Wajib Pajak. Sisanya, masih ada 78,2% faktor atau variabel lain yang

dimungkinkan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selain penerapan e-billing. Hal ini menunjukkan bahwa praktek Kegunaan e-Billing pada Wajib Pajak Badan pada KP2KP Trenggalek berpengaruh positif namun hasilnya belum setinggi dengan penelitian-penelitian terdahulu. Selain itu, juga adanya permasalahan apabila sistem diakses secara bersamaan oleh Wajib Pajak yang biasanya terjadi pada saat membayar SPT Tahunan maka sistem e-Billing menjadi tidak dapat diakses. Maka peneliti mengambil judul penelitian yaitu :

“Pengaruh Kegunaan Sistem *E-Billing* Terhadap Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Trenggalek)”



B. Perumusan Masalah

Bagaimana pengaruh kegunaan sistem *e-billing* terhadap persepsi kepatuhan wajib pajak badan di KP2KP Trenggalek?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan nilai guna kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, hasil analisis penelitian ini dapat memiliki kegunaan yang meliputi Kegunaan teoretis dan kegunaan praktis.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dalam meningkatkan pengetahuan tentang sejauh mana keterkaitan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa *e-billing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat seperti:

- a. Menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait masalah modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa *e-billing* untuk membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di KPP.
- b. Bagi stakeholder, hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengukur kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.